



## SPBE KALBAR

### Terbaik Kedua Nasional

**HASIL** evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih indeks tertinggi kedua se-Indonesia dengan skor 3,42 atau berpredikat baik. Indeks tersebut mengantarkan Pemprov Kalbar naik tiga peringkat dari urutan lima nasional di tahun 2022.

Hasil evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Seperti diketahui, pemerintah menerapkan SPBE dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Sekretaris Daerah (Kalbar) Kalbar Harisson mengucap syukur atas capaian tersebut. "Alhamdulillah, berdasarkan hasil evaluasi SPBE oleh Kemenpan, Provinsi Kalbar menempati posisi kedua se-Indonesia," kata Harisson kepada awak media, Jumat (3/2).

Menurut Harisson, capaian itu menunjukkan kualitas kinerja dan pelayanan jajaran Pemprov Kalbar yang semakin membaik. Harisson menyebutkan, evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Kalau semua berbasis elektronik, maka semua akan terbuka. Termasuk semua transaksi. (Kalau) Lebih terbuka maka akan membuat sistem pencegahan korupsi lebih mantap," pungkasnya.

Terpisah, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan, dengan SPBE Kalbar di urutan kedua dari 38 provinsi merupakan hal yang sangat membanggakan. "Kita (Kalbar) hanya kalah dari DKI dan target saya tahun ini (2023) harus jadi yang pertama, saya yakin kita bisa," katanya.

Hal tersebut menurutnya bukti bahwa tata kelola Pemprov Kalbar termasuk yang terbaik. Ia berani mengatakan demikian karena dari hasil penilaian lainnya Kalbar sudah sangat baik. Seperti nilai MCP dari KPK Kalbar berada di urutan ketiga. Lalu untuk survei integritas KPK Kalbar juga berada di urutan kelima. Kemudian penyerapan anggaran dan pendapatan berada di urutan keempat nasional.

"Bahkan kalau mau dinilai dari sisi belanja dan pendapatan kita (Kalbar) yang terbaik, karena daerah yang pendapatannya urutan pertama belanjanya urutan 33, yang pendapatan nomor dua belanjanya urutan 31. Nah kita pendapatan nomor empat belanjanya nomor empat. Banyak lagi prestasi kita di tingkat nasional, ini semua bukti kinerja jajaran Pemprov bagus. Tahun ini saya harap lebih berprestasi dan saya harap tak ada kasus korupsi yang dilakukan ASN Pemprov," tutupnya. (*bar*)